SERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PEREMPUAN
dan Politik Dalam Islam



Dr. Hj. Zaitunah Subhan

PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM ISLAM
Zaitunah Subhan

viii + 88 halaman:10,5 x 16 cm
1. Pemimpin perempuan dalam Islam
2. Hak politik perempuan

ISBN: 979-3381-20-5

Editor: Hidayatut Thayyibah
Rancang Sampul: Enyeng
Setting/*Layout*: Santo

Penerbit:
Pustaka Pesantren
(Kelompok Penerbit *LKiS)*
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp/ Faks.: (0274) 7472110/419924
e-mail: elkis@indosat.net.id

Bekerja sama dengan *el-Kahfi*
(Lembaga Kajian Humanis & Feminis Islam)
Jl. Mawar 49 Ciputat Molek Jakarta Selatan
Telp.: 021-7418661
e-mail: el-kahfi@asia.com

Cetakan I: Mei 2004

Percetakan dan distribusi:
PT *LKiS* Pelangi Aksara
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp/ Faks.: (0274) 7472110/419924
e-mail: elkis@indosat.net.id

Pendahuluan

Masalah kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan yang menarik. Apalagi bila dikaitkan dengan agama, terutama Islam yang selama ini dikenal sebagai agama penganut patriarkhi Arab.

Saat ini, gerakan perempuan sudah melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan menuju fase kepemimpinan. Bahkan diramalkan, suatu saat nanti perempuan akan memperoleh kekuatan yang mencakup semua bidang kehidupan masyarakat.

Teori Darwin dalam *The Descent of Man* yang membahas tentang perbedaan antara

perempuan dan laki-laki, di mana dianalogikan dengan jenis kelamin beberapa spesies mamalia, tampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Beberapa ilmuwan abad ke-19 menyebutkan, bahwa perbedaan biologis laki-laki dan perempuan dianggap mampu mempengaruhi tingkah laku manusia, hal ini disebabkan oleh keadaan fisik, fisiologi dan faktor genetis yang membentuk diferensiasi peran perempuan dan laki-laki.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori terakhir ini mendapat banyak kritik. Perbedaan kemampuan intelektual perempuan dan laki-laki tidak terbukti, karena kemampuan IQ merupakan kemampuan universal. Contohnya, perempuan ternyata mampu berperan dan masuk dalam bidang yang selama ini dianggap hanya dapat dilakukan oleh laki-laki.

Adanya kenyataan bahwa transformasi dan pemahaman terhadap ajaran agama sebagai sebuah doktrin yang tak terbantahkan, mengakibatkan nilai-nilai agama yang lebih penting untuk dipahami terabaikan begitu saja. Sebagaimana dikemukakan Muhammad Abduh bahwa ketika agama diartikan secara sempit, kaku, dan beku tanpa memperhatikan

perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, perbedaan lingkungan dan latar belakang sosial budaya umat Islam yang beragam, maka akan mengakibatkan ajaran dan hukum Islam kehilangan relevansi dengan peradaban dan kemajuan intelektualitas masyarakat yang *heterogen*. Sehingga, ajaran Islam (hukum Islam) tidak lagi mempunyai andil dan peran sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, orang akan berasumsi bahwa Islam merupakan agama yang hanya berlaku untuk negeri di mana Islam diturunkan.

Pemimpin Perempuan dalam Sejarah

Memasuki *millenium* ketiga, peranan perempuan semakin meningkat; tidak lagi dapat dihalangi untuk berkiprah sejalan dengan langkah mitranya, yaitu kaum laki-laki. Dua penulis terkenal, John Naisbitt dan Patricia Aburdence, dalam bukunya *Megatrend 2000*, pada bab *The 1990's Decade of Women in Leadership*, meramalkan bahwa dasawarsa tahun 1999-an dan memasuki *millenium* ketiga, peranan perempuan semakin meningkat. Walaupun ramalan tersebut didasarkan atas fakta dan pengalaman historis perempuan Amerika Serikat, tidak berarti di Indonesia

tidak akan terkena dampaknya. Karena, kehidupan masyarakat di era globalisasi ini saling mempengaruhi.

Kebolehan perempuan jadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya, sesama kaum perempuan, maupun sebagai pemimpin laki-laki, menurut penulis tidak perlu dipermasalahkan, sebagaimana kebolehannya dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah, yang tersebut dalam surat at-Taubat [9]:71: *Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi pemimpin sebagian yang lain. Mereka mengajak berbuat yang makruf dan dan mencegah yang mungkar. Mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* Lebih jelas lagi, ditegaskan dalam sabda Rasulallah Saw.: "Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya; seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab

atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari) (Ibnu Hajar, tth, III,: 41). Di sini, rasul tidak membedakan status laki-laki maupun perempuan sebagai pemimpin, dengan menjelaskan bahwa seorang suami adalah kepala keluarga (*râ'in fî ahlih),* sedangkan istri sebagai pemimpin dirumah suaminya (*ra'iyah fî bait zaujihâ).* Keduanya (suami istri) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya.

Kepemimpinan, menurut Teoti Heraty Noerhadi, berarti memperoleh atau mencapai keunggulan sebagai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut publik. Kepemimpinan bisa juga berarti kompetisi dan hirarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab.[1] Jadi, kepemimpinan yang baik adalah yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana.

Kepemimpinan sebenarnya bisa saja diartikan dalam makna yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kekuasaan di bidang politik belaka. Misalnya, kepemimpinan

---

[1] Melly G. Tan, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta; Sinar Harapan, 1991), hlm. 10.

yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan. Ini pemahaman dalam lingkup domestik. Akan tetapi, kepemimpinan di sini adalah yang berkaitan dengan gejala yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya, ada pemimpin dalam dunia ide, dan ada pula pemimpin dalam dunia nyata. Di era globalisasi ini, kepemimpinan semakin beragam, sehingga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk meraihnya demi mendorong perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Memang, ketika berbicara tentang kepemimpinan, pemikiran kita terfokus pada nilai-nilai kekuasaan. Bisa jadi kita membayangkan para penguasa negara *super power,* seperti Margaret Thatcher yang dikenal dengan predikat *The Iron Lady* (perempuan besi), Golda Maier, Benazer Bhutto, Indira Ghandi, Corazon Aquino, Madeleine Albright, dan lain-lain. Mereka ini adalah sosok perempuan yang mewakili citra pemimpin perempuan di dunia, berwibawa dalam memegang kepemimpinan bangsa dan negaranya.

Fakta sejarah membuktikan bahwa di masa lalu, perempuan Indonesia juga berkesempatan dan berpeluang memegang jabatan kekuasaan sebagai kepala negara, dan berperan aktif dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan, baik ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Bahkan mamanggul senjata dalam bidang militer tanpa harus meninggalkan perannya di ruang domestik. Sumber tertua yang bisa diperoleh dari sejarah Indonesia adalah:

Di Jawa Timur, kerajaan Majapahit pernah diperintah oleh ratu selama 22 tahun, yaitu ketika Raja Jayanegara meninggal pada tahun 1328, karena tidak dikarunai seorang anak pun, maka raja mengangkat adik perempuannya untuk menggantikan kedudukannya. Dialah yang dikenal dengan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Setelah memerintah selama 22 tahun, yaitu pada tahun 1350, ia mengundurkan diri dan digantikan oleh puteranya Hayam Wuruk. Di masa inilah kerajaan Majapahit tersohor sampai manca negara. Dan pada masa akhir kekuasaan Majapahit, kurang lebih selama 16 tahun

kemudian (1429–1445) seorang ratu memerintah lagi, yaitu Ratu Suhita.[2]

Di Jawa Tengah, dari abad VII M. tepatnya tahun 674 M., menurut catatan orang Cina, rakyat kerajaan Holing (yang dimaksud adalah kerajaan Kalingga) menobatkan seorang perempuan sebagai ratu dengan gelar Ratu His-Mo (Sima). Lebih lanjut diungkapkan bahwa pemerintahan pada saat itu amat baik dan adil meski bersifat keras. Sebagai contoh diceritakan bahwa apa pun yang terjatuh di jalanan tidak seorang pun berani mengambilnya. Cerita ini sampai ke negara Cina, dan ketegasan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu ini menarik perhatian Raja Ta-Shih. Dikirimnya pundi-pundi berisi emas dan kemudian diletakkan di jalan kerajaan. Pundi-pundi tersebut selama tiga tahun tidak satu pun orang yang berani mengambilnya. Dengan tidak disengaja putera sang ratu telah menginjak benda-benda tersebut. Peristiwa ini diketahui ratu dan dengan kemarahannya ia pun menjatuhkan hukuman mati pada putera mahkota. Para menteri berupaya

---

[2] Poesponegoro D. Marwati dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), hlm. 433.

untuk membujuknya agar diberi keringanan bagi putera mahkota, dan diputuskan dengan hukuman potong kaki. Meski permohonan terus mengalir, akhirnya ratu memerintahkan agar jari-jari kakinya dipotong.[3] Pada masa perkembangan Islam, di Jawa juga dikenal seorang pemimpin perempuan yang berkuasa di wilayah Jepara, tepatnya di Kalinyamat, daerah kekuasaan kesultanan Demak. Di masa pemerintahannya, Jepara berkembang dengan pesat; perdagangan sampai keluar negeri. Dan pada tahun 1574 Ratu Kalinyamat ini mengirim bantuan ke negeri Aceh juga Ambon untuk menghadapi Portugis.

Di Sumatra, tepatnya di Aceh, perempuan cukup banyak berperan di ruang publik atau yang dianggap sebagai dunianya kaum laki-laki. Belanda sebagai penjajah, tidak kurang dari 40 tahun mendapat perlawanan rakyat Aceh. Di sana peranan dan pengaruh kaum perempuan sangat menonjol. Jiwa raganya dikorbankan demi membela bangsa, negara, dan agamanya; dengan semangat kesatriaan dan kepahlawanan, mereka dikagumi musuh-

---

[3] *Ibid.*, hlm. 94.

musuh; mereka berani tampil dengan gagah berani memimpin di medan perang, misalnya, Cut Nyak Din. Pada mulanya Cut Nyak Din mendampingi suaminya Teuku Umar (1896), keluar masuk rimba bergerilya menghadapi pasukan Belanda. Sewaktu Teuku Umar tertembak pada tahun 1899, ia menggantikan kedudukan suaminya sebagai pemimpin perang. Selama enam tahun tidak putus asa mengadakan perlawanan. Selain itu, tercatat nama-nama pahlawan dari Aceh ini, misalnya, Pocut Meurah Intan dan Cut Nyak Meutia, juga Pocut Baren yang selalu mendampingi Cut Nyak Din. Setelah Cut Nyak Din tertangkap oleh Belanda (Nopember 1905), ia melanjutkan perlawanannya terhadap Belanda sampai tahun 1910.[4]

Dalam kekuasaan pemerintahan pun peranan kaum perempuan Aceh tidak kalah. Tercatat empat orang sultanah, memimpin selama kurun waktu hampir 60 tahun (1640—1699). Ratu *pertama* adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641—1675), puteri

---

[4] Ismail Sofyan (dkk), *Wanita Utama Nusantara dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: tp. 1994), hlm. 139—140.

Sultan Iskandar Muda. *Kedua,* Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675 – 1678). *Ketiga,* Inayat Syah Zakiatuddin Syah (1678 – 1688), dan *keempat,* Kamat Syah Zairatuddin Syah (1688 – 1699). Masing-masing sultanah tersebut mengeluarkan mata uang emas yang disebut *deureuham* (dirham).[5]

Sumber sejarah menyebutkan bahwa para sultanah tersebut memimpin negaranya dengan bijak dan meraih kesuksesan. Di masa pemerintahannya, semua aturan negara dilaksanakan dengan konsekuen, sehingga tidak heran hukum dihargai, ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang dengan pesat. Dari sana kita dapat mengenal pujangga terkenal, seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, dan lain-lain. Mereka menghasilkan buah karya yang dapat dinikmati generasi kita sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena sultanah-sultanah tersebut memiliki ilmu pengetahuan, termasuk penguasaan berbagai bahasa (Arab, Spanyol, Persi) di samping bahasa daerah (Aceh) dan bahasa Melayu. Di bidang perdagangan, terjadi kemajuan pesat dan jalinan

---

5 *Ibid.*, hlm. 42—45.

kerja sama dengan beberapa negara luar. Sehingga kebijakan ini berhasil mencegah usaha VOC memonopoli perdagangan di Aceh.[6]

Pertahanan negara dan kehidupan perdagangan yang telah mapan tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi justru harus dipertahankan untuk mengantisipasi Portugis di selat Malaka. Pada masa ini (abad ke-16), kesultanan Aceh terkenal sebagai negara yang besar. Aceh diperintah oleh sultan, dan diangkatlah salah seorang pemimpin armada laut yang sebelumnya menjadi komandan suatu pasukan perempuan yang terdiri dari para janda (suami tewas dalam menghadapi Portugis), yaitu Keumala Hayati, sosok perempuan yang berpangkat laksamana. Berita tentang laksamana perempuan ini juga diperoleh dari Jhon Davis, seorang nahkoda kapal Belanda berkebangsaan Inggris. Diceritakan bahwa kerajaan Aceh memiliki armada laut sekitar 100 kapal perang dan salah satu komandannya adalah seorang perempuan yang berpangkat Admiral. Laksamana Keumala Hayati mencatat prestasi yang gemilang, pada tahun 1599 ia berhasil

---

[6] *Ibid.*, hlm. 50—59.

mengalahkan dua buah kapal Belanda yang dipimpin Cornelis dan Frederick de Houtman.[7]

Di Sulawesi Selatan, kerajaan Islam Abad XIX ini, juga pernah dipimpin oleh seorang penguasa perempuan, yaitu Siti Aisyah We Tenriolle yang berkuasa di kerajaan Ternate pada tahun 1856, bahkan menguasai kerajaan Bugis.

Dari fakta-fakta sejarah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama. Yaitu, sama-sama mempunyai potensi dan kecerdasan, keinginan dan cita-cita, impian dan harapan, juga rasa khawatir dan kecemasan. Dengan kesadaran ilmu pengetahuan yang diperoleh perempuan, dia tidak hanya mampu berperan sebagai ibu dari anak-anaknya atau istri yang hanya berkutat di ruang domestik. Akan tetapi, mereka juga mempunyai potensi dan dituntut untuk terus dikembangkan.

Di era globalisasi seperti sekarang, kesempatan ke dunia publik mulai terbuka lebar bagi kaum perempuan, khususnya

---

[7] *Ibid.*, hlm. 30—39.

perempuan Indonesia. Apalagi mayoritas mereka beragama Islam, sementara agama Islam secara ekplisit ataupun implisit memberikan *support* bagi setiap muslim (termasuk muslimah) agar senantiasa meningkatkan aktualisasi diri dan dedikasi, bahkan merupakan suatu keharusan bagi setiap individu. Sayangnya, sering kali prasyarat untuk masuk ke wilayah publik hanya harus dipenuhi oleh perempuan, sementara bagi kaum laki-laki tidak.

Menurut Islam tidaklah demikian. Prasyarat berlaku sama dan harus dipenuhi, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah menegaskan dalam firmanNya surat an-Nur [24]: 30 – 31: *Katakan kepada orang-orang laki-laki agar mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Dan katakan kepada orang-orang perempuan agar mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka.*

Hanya saja dalam lanjutan ayat 31, khusus bagi kaum perempuan tidak diperkenankan menampakkan perhiasaannya, kecuali yang biasa tampak dan menutupkan kain kerudung ke dadanya. Di sinilah nilai

kesopanan dan etika moral dalam pergaulan laki-laki dan perempuan di setiap kesempatan. Hal ini harus senantiasa diperhatikan dan dipelihara sebagai bangsa yang berbudaya.

Mamasuki *millenium* ketiga ini, bakal terjadi perubahan dalam struktur peranan perempuan Indonesia. Ide dan pemikiran Barat diperkenalkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk kaum perempuan, sehingga mereka berupaya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama walaupun jumlahnya belum bisa dikatakan seimbang dengan laki-laki.

Pemikiran modern kaum perempuan Indonesia telah diawali oleh tokoh-tokoh pahlawan perempuan Indonesia. Mereka menyadari keberadaan kaumnya dan kedudukan serta peranannya dalam masyarakat. Mereka sadar akan pentingnya pendidikan, karena dengan modal pendidikan yang cukup merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong kemajuan dan emansipasi kaum perempuan. Dengan harapan bahwa pendidikan yang dimiliki perempuan akan memunculkan kesadaran tentang hak dan kewajibannya,

sehingga bangsa dan negara akan maju, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia dewasa ini.

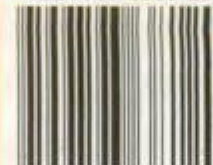
Karena itulah, ketika kaum laki-laki membentuk berbagai macam organisasi kebangsaan, kaum perempuan juga tidak ketinggalan. Misalnya, pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 dan organisasi-organisasi sosial politik lainnya, memberikan inspirasi lahirnya organisasi kaum perempuan. Hampir di seluruh kota, organisasi keperempuanan pun lahir, antara lain: Wanito Utamo, Isteri Sedar, Aisyah, Puteri Mardika, Kerajinan Amai Setia, Pikat, Perempuan Islam, Muslimat NU, Perempuan Katolik, dan lain-lain.

Kaum perempuan di masa kebangkitan kebangsaan dan perjuangan membela kemerdekaan memiliki kesadaran berpolitik dan keberanian yang patut dibanggakan. Meskipun secara kuantitas dan kualitas masih terbatas, namun mereka telah sadar akan diri pribadi dan status mereka. Karena mereka tumbuh besar dan hidup di bawah kekuasaan penjajah. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengingkari adanya para pelopor dari kalangan perempuan hampir di setiap kota di Indonesia.

Nama-nama yang tidak asing lagi bagi kita, misalnya, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rahman al-Yunuasiyah, Nyai Haji Ahmad Dahlan, Hajjah Rusana Said, Maria Walanda maramis, dan Rohana Kudus; merupakan nama-nama tokoh perempuan dari kalangan elit modern. Bermodal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka berupaya dengan berbagai cara untuk menyadarkan kaumnya tentang kedudukan dan perannya dalam masyarakat.

Dalam situasi yang serba dibatasi oleh penjajahan pemerintahan Kolonial Belanda, mereka berani mengambil keputusan-keputusan politik. Misalnya, ketika kongres perempuan Indonesia pertama yang diadakan di Yogyakarta tanggal 22 – 25 Desember 1928, mereka mengirim mosi kepada pemerintah agar diadakan dana untuk para janda, memperbanyak pendidikan untuk kaum puteri, dan mencegah perkawinan muda. Selanjutnya, kongres perempuan Indonesia kedua pada tahun 1935; mosi untuk memperhatikan keadaan kaum buruh perempuan. Sedangkan pada kongres ketiga membahas kedudukan

`Perempuan berhak mendapatkan
kekuasaan setinggi-tingginya`



el-KAHFI

PUSTAKA
Pesantren